KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jokowi Ingin RUU TPKS Disahkan
Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Jokowi Ingin RUU TPKS Segera Disahkan

Presiden menginstruksikan jajarannya menyiapkan DIM dari draf RUU TPKS.

■ DESSY SUCIATI SAPUTRI, NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat segera disahkan. Ia mengatakan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan.

"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal *Youtube* Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (4/1).

Ia mengaku, terus mencermati RUU TPKS sejak dalam proses pembentukannya pada 2016 hingga saat ini yang masih diproses di DPR. Presiden menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar segera berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan DPR terkait RUU TPKS ini.

Jokowi meminta ada percepatan pengesahan RUU TPKS yang dinilai sangat mendesak ini. Ia juga menginstruksikan gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS agar segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah terhadap draf RUU yang disiapkan DPR. "Sehingga, proses pembahasan bersama nanti lebih cepat masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual," ujar Jokowi.

Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya menilai, langkah percepatan dibutuhkan agar proses perumusan RUU TPKS menjadi UU tidak memakan waktu terlalu lama. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot di level Panja, koordinasi antara Kemenkumham dan Kementerian PPPA dengan tim di DPR diharapkan bisa lebih cepat.

Hal ini mengingat dorongan dari Presiden untuk masuk ke pokok-pokok substansi guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. "Apa yang telah dinyatakan oleh Presiden Jokowi benar-benar menjadi momentum bagi kemajuan upaya melindungi korban kekerasan seksual. Saya yakin, ini pula yang menjadi kesadaran Presiden sehingga turun perintah ini kepada para pembantunya," ujarnya.

Bagi Willy, apa yang telah disampaikan Presiden merupakan kemajuan yang luar biasa dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Pernyataan tersebut juga telah memberikan dorongan bagi semua pihak, baik pemerintah, DPR, dan seluruh komponen masyarakat yang peduli dengan isu ini untuk terus peduli dan mengawal terbentuknya regulasi yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Pembahas

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan segera memutuskan siapa yang akan membahas RUU TPKS. Pembahasan apakah dilakukan oleh panitia khusus (pansus) atau Badan Legislasi (Baleg).

"Apakah itu kemudian diselesaikan di pansus atau kemudian di Baleg, tapi pada prinsipnya kita ingin undang-undang itu juga cepat selesai," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/1).

Ia mengatakan, pandangan setiap fraksi akan menjadi pertimbangan pimpinan DPR dalam rapat Bamus mendatang. Terutama, terkait pembahasan RUU TPKS akan dilakukan oleh siapa. "Itu yang juga menjadi pertimbangan dasar pertimbangan nanti, selain undang-undang juga bagus dan cepat selesai. Sehingga menjadi pertimbangan untuk menentukan melemparkan ke mana," ujar Dasco.

Sementara, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyarankan agar RUU TPKS tak dibahas Baleg DPR. Ia mengusulkan agar pembahasanya dilakukan pansus yang terdiri atas lintas fraksi dan komisi.

"Soal siapa yang paling ideal untuk melakukan pembahasan, saya kira *sih* lebih baik diserahkan kepada Pansus RUU TPKS," ujar Lucius.

Menurutnya, kerja Baleg saat ini sudah sangat padat karena banyaknya RUU lain yang mereka bahas. Ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "Baleg mempunyai terlalu banyak kesibukan terkait RUU-RUU lain dan beban pembahasan RUU TPKS akan membuat mereka tidak akan fokus pada tugas penyusunan RUU lain," ujar Lucius. ■ **ed**: agus raharjo

DPR - RI